

**PEMBERDAYAAN TANAH MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: STUDI IMPLEMENTASI
PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA DI DESA WISATA
PURWABAKTI KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

AMALIA AROFAH PUJI SOPYAN

NIT. 20923433

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRACT

Community Land Empowerment (PTM) or Agrarian Reform Access Handling is a program organized in order to create community prosperity and welfare. In addition to meeting the objectives of agrarian reform, PTM is also designed to help achieve sustainable development goals through issues that are in line with the Sustainable Development Goals (SDGs) indicators. This research seeks to uncover the potential of PTM to support SDGs in the implementation of access arrangements in Purwabakti Tourism Village. The method used in this research is qualitative case study type and descriptive approach with data obtained from interviews, observations, and document studies. Qualitative analysis in this research is in the form of SWOT analysis, and fishbone diagram analysis. In relation to the five conditions of the SDGs, Purwabakti Village was identified as facing problems in the form of a recorded poor population of 44.39%, a small number of land certificate ownership, road accessibility and transportation that still need improvement, lack of educational facilities, the need for farming business support in the development of POC, the high cost of fertilizers, and the lack of community education as a workforce. PTM activities by the BPN Bogor I Purwabakti Village are divided into tourism village development activities access arrangement by determining the empowerment model in the form of an integrated agricultural system with an action plan to collaborate with 9 institutions / agencies through 18 program plans. Meanwhile, the empowerment strategy used is the gotong royong development strategy with efforts to encourage community independence through its agricultural potential and umkm businesses. Overall, the PTM program implemented in Purwabakti Village is not fully relevant and leads to the SDGs goals. The findings in this study show that the NCD program in Purwabakti Village has relevance to SDGs goal (17): partnerships for the goals and SDGs (1): no poverty. Meanwhile, the PTM program in Purwabakti Village is not yet relevant to SDGs goal (2): zero hunger; SDGs (5): gender equality; and SDGs (8): decent work and economic growth.

Keywords: community land empowerment, reform, SDGs

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRACT	xii
INTISARI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang.....	1
B.Perumusan Masalah.....	5
C.Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A.Penelitian Terdahulu.....	9
B.Kerangka Teoritis.....	16
1. Pembangunan Berkelanjutan dan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	16
2. Implementasi Penataan Akses sebagai Bagian dari Reforma Agraria ...	19
3. Relevansi Pemberdayaan Tanah Masyarakat dengan SDGs	28
4. Pengentasan Kemiskinan sebagai Prasyarat Keberhasilan dalam Pembangunan Berkelanjutan.....	29
5. Kecukupan Pangan	31
6. Kesetaraan Gender.....	33
7. Lapangan Pekerjaan untuk Pertumbuhan Ekonomi	34
8. Kemitraan dalam Pembangunan Berkelanjutan	35
C.Kerangka Pemikiran.....	37
D.Pertanyaan Penelitian.....	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	40
A.Format Penelitian.....	40

B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	42
1. Jenis dan Sumber Data	42
2. Teknik Pengumpulan Data	43
D. Informan Penelitian dan Teknik Pemilihan Informan.....	44
E. Validitas Pengambilan Data.....	45
F. Definisi Operasional Variabel.....	45
G. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV PROFIL DESA: SEJARAH, GEOGRAFI, MASYARAKAT, DAN PARIWISATA DESA PURWABAKTI	51
A. Sejarah Desa Purwabakti.....	51
B. Kondisi Geografis Desa Purwabakti	52
C. Kondisi Demografis dan Sosial Ekonomi Desa Purwabakti.....	54
D. Potret Wisata ‘Dewi Purba’	59
BAB V PROBLEM SDGS DESA DAN PEMBERDAYAAN TANAH MASYARAKAT DI DESA PURWABAKTI.....	63
A. Kondisi Empirik/Problem Desa Terkait SDGs di Desa Purwabakti	63
2. Kondisi Kecukupan Pangan di Desa Purwabakti.....	76
3. Kesetaraan Gender di Desa Purwabakti	83
4. Kondisi Peluang Pekerjaan dan Diversifikasi Usaha	84
5. Kondisi Kemitraan di Desa Purwabakti	87
B. Pemberdayaan Tanah Masyarakat di Desa Purwabakti	91
BAB VI LANGKAH MENUJU SDGS: PRASYARAT DAN POTENSI PEMBERDAYAAN TANAH MASYARAKAT DI DESA PURWABAKTI	115
A. Prasyarat Program untuk Pencapaian Tujuan SDGs	115
B. Potensi Program Penataan Akses Reforma Agraria terhadap Indikator SDGs	127
C. Perbandingan Potensi PTM untuk Mencapai Indikator SDGs.....	153
BAB VIII PENUTUP	158
A. Kesimpulan.....	158
B. Saran.....	160
DAFTAR PUSTAKA	162

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reforma Agraria atau Pembaruan Agraria merupakan upaya untuk merestrukturisasi kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah, sejalan dengan mandat konstitusi berdasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 33 ayat (3) yang mengamanatkan negara sebagai pemilik kewenangan dalam penguasaan sumber daya alam termasuk sumber daya agraria dan pemegang tanggung jawab administrasi pertanahan untuk melindungi kepemilikan tanah pemegang hak dalam sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Doly, 2017; Chavunduka, Dipura and Vudzijena, 2021). Ditinjau dari aspek yuridis dan historis, Reforma Agraria dapat dikatakan sebagai gerakan sosial bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka melaksanakan tujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, memperluas lapangan kerja, menjaga keberlanjutan sumber-sumber ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup dan ketahanan pangan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (Sihombing and Lisdiyono, 2017). Tujuan akhir dari kebijakan Reforma Agraria adalah untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan (Widodo, 2017) melalui upaya dalam mengatasi ketimpangan distribusi lahan, konflik agraria, dan kesenjangan sosial dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai kementerian utama pelaksana (Alvian and Mujiburohman, 2022; Ditjen Penataan Agraria ATR/BPN, 2020). Pada periode RPJMN 2015-2019 hingga 2019-2024 pemerintahan Presiden Joko Widodo, pelaksanaan Reforma Agraria terus didorong untuk mencapai target 9 juta hektar lahan melalui legalisasi aset dan redistribusi tanah (Utomo, 2021; Alvian and Mujiburohman, 2022).

Dalam aspek yang lebih luas, Reforma Agraria tidak hanya dapat dipahami untuk tujuan dari aspek sosial ekonomis melalui meningkatkan penghasilan dan

memberi fungsi sosial pada hak milik saja, tetapi juga meliputi aspek sosial politik dengan mengubah sistem tuan tanah dan pembagian tanah yang adil hingga aspek mental psikologis melalui hubungan kerja pemilik dan penggarap (Zein, 2014). Reforma Agraria yang sesungguhnya bukan hanya sekedar membagi dan melegalkan tanah, tetapi juga membuat bidang-bidang tanah tersebut memiliki akses yang lebih baik (Santosa, Wicaksono and Nugroho, 2019). Reforma Agraria didefinisikan sebagai penataan ulang pola kepemilikan dan penguasaan tanah yang didukung dengan fasilitas lainnya seperti perlindungan hukum, ketersediaan akses kredit, akses terhadap informasi dan teknologi terkini, penyuluhan pertanian, maupun akses terhadap sarana produksi dan bantuan dalam pemasaran (Fauzi, 2002). Reforma Agraria dituntut mampu untuk menyeimbangkan kesetaraan dalam akses terhadap lahan maupun sumber daya alam, keuangan/modal, teknologi dan tenaga kerja dengan efisien untuk memanfaatkan pasar (Limbong, 2012 dalam Arisaputra, 2016; Boberg-Fazlić *et al.*, 2022).

BPN (2010) dalam Arisaputra (2016) menyebutkan hanya 0,2% orang Indonesia yang menguasai sebesar 56% aset nasional, di mana 87% aset tersebut merupakan tanah dan sekitar 7,2 juta hektar tanah dikuasai oleh swasta dengan sengaja ditelantarkan. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN (2021) melampirkan *gini ratio* terkait penguasaan tanah di Indonesia yang mencapai 0,58. Hal ini menggambarkan hanya 1% dari penduduk yang memiliki kendali sumberdaya agraria, tanah dan ruang sebesar 58%, sedangkan 99% penduduk lainnya hanya mempunyai akses atas aset sisa sumber daya sebesar 42%. Kondisi tersebut bertambah buruk dengan adanya pemegang hak atas tanah dengan skala besar yang menelantarkan tanahnya karena unsur kesengajaan dengan motif spekulasi untuk pinjaman bank, menaikkan nilai tanah untuk jual beli, maupun ketidakmampuan secara teknis, manajerial dan finansial pemegang hak. Oleh sebab itu, kurangnya akses rakyat Indonesia terhadap pengelolaan tanah adalah problem esensial di samping permasalahan tidak meratanya distribusi penguasaan lahan. Hadirnya Reforma Agraria melalui penataan aset dan penataan akses diharapkan dapat menyeimbangkan permasalahan distribusi aset maupun akses sumberdaya lahan di masyarakat.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018, penataan akses atau dapat disebut *access reform* telah digariskan pelaksanaannya sebagai pemberian kesempatan akses permodalan atau bantuan lain yang diberikan untuk subjek Reforma Agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah,. Langkah-langkah tersebut meliputi pemetaan sosial, peningkatan kapasitas lembaga, pendampingan usaha, peningkatan keterampilan, penerapan teknologi tepat guna, diversifikasi usaha, fasilitas akses permodalan, fasilitas pemasaran, peningkatan basis data dan informasi, serta penyediaan infrastruktur pendukung lainnya (Presiden Republik Indonesia, 2018). Kegiatan ini dapat berupa usaha penumbuhan, pengembangan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, perilaku dan sikap, kemampuan serta kesadaran dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang terfasilitasi sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat (Rohman and Astuti, 2019).

Reforma Agraria menyelenggarakan penataan akses melalui Penanganan Akses Reforma Agraria (PARA) atau lebih dikenal dengan Pemberdayaan Tanah Masyarakat (PTM) yang hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mencapai target Pembangunan Berkelanjutan yang sejalan dengan komitmen global *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs merupakan agenda penting yang telah dideklarasikan dalam masyarakat internasional sebagai respons terhadap tantangan global seperti perubahan iklim, kemiskinan, ketidaksetaraan, dan degradasi lingkungan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan agenda SDGs tahun 2030 yang mencakup 17 tujuan dan 169 target yang melibatkan aspek-aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi yang secara komprehensif digunakan sebagai panduan kebijakan dan program terkait. Selain itu, Bappenas (2017) menyebutkan bahwa SDGs disebut sebagai upaya pembangunan yang bertujuan untuk menjaga mutu kehidupan dari suatu generasi ke generasi berikutnya lewat kesejahteraan ekonomi berkesinambungan, menjaga kelangsungan sosial masyarakat, serta memastikan tercapainya keadilan dan tata kelola yang efektif. Komitmen ini kemudian dituang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam konteks

tersebut, BPN (2023) menjelaskan kegiatan PTM yang diselenggarakan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat ini bersinggungan dan memiliki hubungan dengan poin-poin pada tujuan SDGs (1) tanpa kemiskinan melalui model akses kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain; (2) tanpa kelaparan kegiatan penanganan akses untuk ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan; (5) kesetaraan gender melalui kegiatan pemberian hak yang sama terhadap sumber ekonomi; dan (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi fasilitas akses kepemilikan tanah, fasilitas peluang kerja dan inovasi; serta (17) kemitraan untuk mencapai tujuan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan.

Pada pelaksanaannya, beberapa publikasi menyebutkan kegiatan penataan akses dinilai kurang optimal dan belum berjalan dengan baik (Anida, Daryanto and Hendrawan, 2018; Rohman and Astuti, 2019; Ahbar, 2021; Latifah, Wibowo and Widiyanto, 2022). Hal tersebut diakibatkan oleh beberapa problem seperti kurangnya koordinasi antar sektor, adanya ego sektoral kelembagaan, terbatasnya anggaran, hingga keterlambatan organisasi perangkat daerah dan perbankan. Pelaksanaan penataan akses yang tidak maksimal menyebabkan terhambatnya tujuan yang ingin dicapai, dalam hal ini tidak dapat membantu peningkatan produktivitas pada akses lahan. Namun, di sisi lain, Desa Wisata Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor diketahui menjadi salah satu *best practice* lokasi yang menjadi bagian dari program Pengembangan Tanah Masyarakat melalui Reforma Agraria menurut beberapa pemberitaan (Kementerian ATR/BPN, 2023). Dengan bentangan alam berupa pegunungan, sungai dan persawahan, desa ini memiliki potensi sektor pertanian yang besar. Kegiatan fasilitasi penataan akses yang dilakukan yaitu pembinaan pertanian, pariwisata, serta usaha mikro kecil menengah (UMKM). Keterlibatan dan kolaborasi efektif dari berbagai belah pihak termasuk masyarakat, pemerintah desa dan kabupaten, serta Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dalam mengembangkan potensi wilayah mengantarkan Desa Wisata Purwabakti mencapai 75 besar Anugerah Desa Wisata pada tahun 2023 yang diakui oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Program Pemberdayaan Tanah Masyarakat di Desa Purwabakti menjadi penting untuk diteliti dalam rangka memahami lebih dalam strategi dan model kegiatan landasan programnya. Diperlukan identifikasi elemen-elemen yang dapat berkontribusi dalam dampak kegiatan dan bagaimana hal ini dapat menjadi potensi untuk mendukung tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di tingkat desa. Penelitian ini bermaksud untuk menggali lebih dalam riwayat implementasi kegiatan Pemberdayaan Tanah Masyarakat di Desa Wisata Purwabakti melalui penataan akses Reforma Agraria dapat berperan untuk mempengaruhi perkembangan ekonomi, pertanian, dan sektor pariwisata dalam pembangunan berkelanjutan dengan prinsip SDGs di tingkat desa. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman lebih lanjut tentang potensi dan peran Pemberdayaan Tanah Masyarakat dalam mencapai tingkat pembangunan berkelanjutan dengan judul “**Pemberdayaan Tanah Masyarakat dalam Mendukung *Sustainable Development Goals*: Studi Implementasi Penataan Akses Reforma Agraria di Desa Wisata Purwabakti**”.

B. Perumusan Masalah

Pelaksanaan penataan akses Reforma Agraria di beberapa wilayah dinilai kurang efektif pada beberapa sisi (Anida, Daryanto and Hendrawan, 2018; Rohman and Astuti, 2019; Trinanda Putra, Nugroho and Nashih Luthfi, 2021) akibat hambatan pada optimalisasi yang tentunya dapat memengaruhi tujuan yang ingin dicapai. Di sisi lain, beberapa upaya pembangunan desa telah menunjukkan adanya potensi desa untuk mendukung pencapaian SDGs melalui pengembangan desa dengan kegiatan pemberdayaan yang dapat berdampak positif (Irwan and Agustang, 2021; Latifah, Wibowo and Widiyanto, 2022; Taufik, 2022). Hal ini tentu menjadi sebuah evaluasi sehingga memerlukan upaya lebih lanjut untuk pembelajaran pada program lanjutan supaya dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap rencana pelaksanaan program, dalam hal ini yaitu pencapaian kesejahteraan sosial ekonomi dan keberlanjutan di tingkat lokal melalui nilai tambah dari akses tanah yang dimiliki.

Kesuksesan kegiatan ADWI yang dilaksanakan di Desa Wisata Purwabakti, Kabupaten Bogor berkolaborasi dengan kegiatan penataan akses dapat menjadi pembelajaran dan model program utamanya bagi wilayah lain. Program Pemberdayaan Tanah Masyarakat di desa ini dapat menjadi *site* penelitian untuk memahami strategi melalui potensi implementasi program, mengidentifikasi elemen-elemen yang berkontribusi, serta mengetahui keberlanjutan pelaksanaan yang dikaitkan pada indikator tujuan SDGs di tingkat desa yang relevan, seperti (1) Tanpa kemiskinan dengan model akses kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lainnya, termasuk sumber daya alam, teknologi baru dan keuangan mikro; (2) Tanpa kelaparan melalui kegiatan yang mengutamakan sektor pertanian untuk mengentaskan kelaparan dengan memperhatikan akses mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang memadai dan mendukung praktik pertanian berkelanjutan; (5) Kesetaraan gender, dengan kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria tanpa membedakan gender dan memberikan hak yang sama bagi perempuan, terhadap sumber-sumber ekonomi maupun fasilitasi akses terhadap kepemilikan tanah; (8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, melalui fasilitasi peluang kerja dan usaha, inovasi serta pengembangan kemitraan; dan (17) Kemitraan untuk mencapai tujuan melalui kerja sama kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan melalui Gugus Tugas Reforma Agraria di tingkat pusat hingga daerah.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk:
 - a. Mengetahui riwayat implementasi Pemberdayaan Tanah Masyarakat (penataan akses) di Desa Purwabakti, termasuk strategi dan model yang digunakan
 - b. Menganalisis potensi kegiatan Pemberdayaan Tanah Masyarakat untuk mencapai tujuan SDGs (1) tanpa kemiskinan
 - c. Menganalisis potensi kegiatan Pemberdayaan Tanah Masyarakat untuk mencapai tujuan SDGs (2) tanpa kelaparan

- d. Menganalisis potensi kegiatan Pemberdayaan Tanah Masyarakat untuk mencapai tujuan SDGs (5) kesetaraan gender
- e. Menganalisis potensi kegiatan Pemberdayaan Tanah Masyarakat untuk mencapai tujuan SDGs (8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi,
- f. Menganalisis potensi kegiatan Pemberdayaan Tanah Masyarakat untuk mencapai tujuan SDGs (17) Kemitraan untuk mencapai tujuan

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara:

a. Manfaat Teoritis/Akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal:

- 1) Memberikan tambahan pengetahuan mengenai riwayat implementasi penyelenggaraan penataan akses reforma agraria oleh instansi terkait dan bagaimana strategi tersebut dapat berkaitan dengan keberhasilan program;
- 2) Mengemukakan potensi kegiatan Pemberdayaan Tanah Masyarakat di desa wisata dengan indikator tujuan SDGs di tingkat desa dengan pemberian akses kepemilikan dan kontrol atas tanah; kegiatan dan program yang mengutamakan sektor pertanian untuk mengentaskan kelaparan; kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria dengan prinsip kesetaraan gender dan memberikan hak yang sama bagi perempuan, terhadap sumber-sumber ekonomi maupun fasilitasi akses terhadap kepemilikan tanah; melalui fasilitasi lapangan kerja dan usaha, inovasi serta pengembangan pola kemitraan; serta melalui GTRA.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan masukan bagi pemerintah pada umumnya dan Kementerian ATR/BPN pada khususnya dalam hal:

- 1) Perumusan kebijakan penataan akses dan pemberdayaan tanah masyarakat yang lebih terarah teknis pelaksanaannya agar dapat diimplementasikan dengan baik;

- 2) Keberlanjutan program melalui prinsip-prinsip SGDs dan tujuan pembangunan berkelanjutan;
 - 3) Sinergi setiap instansi dalam melaksanakan suatu kebijakan.
- c. Manfaat Sosial yaitu memberikan gambaran tentang keterkaitan Pemberdayaan Tanah Masyarakat dengan SDGs.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kegiatan Pemberdayaan Tanah Masyarakat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I di Desa Purwabakti terbagi menjadi kegiatan pengembangan desa wisata pada bulan Juni hingga penilaian ADWI pada bulan Agustus 2023 serta penataan akses pada tahapan tahun pertama di tahun 2023 dengan penentuan model pemberdayaan berupa sistem pertanian terintegrasi dengan rencana aksi berkolaborasi dengan 9 lembaga/instansi melalui 18 rencana program. Sementara itu, strategi pemberdayaan yang digunakan adalah strategi pembangunan gotong royong dengan upaya mendorong kemandirian masyarakat melalui potensi pertanian dan usaha umkm yang dimilikinya.
2. Berkaitan dengan kelima kondisi SDGs, Desa Purwabakti teridentifikasi menghadapi permasalahan berupa tercatatnya penduduk miskin sebesar 44,39%, kecilnya angka kepemilikan sertifikat tanah, aksesibilitas jalan dan transportasi yang masih memerlukan pembenahan, sarana pendidikan yang kurang, perlunya dukungan usaha tani dalam pengembangan POC, mahalnya pupuk, serta kurangnya pendidikan masyarakat sebagai tenaga kerja. Secara keseluruhan program PTM yang dilaksanakan di Desa Purwabakti belum sepenuhnya relevan dan mengarah pada tujuan SDGs. Hal ini dibuktikan dari temuan penelitian yang menunjukkan bahwa program PTM hanya relevan untuk menjawab dua tujuan SDGs, yakni untuk kemitraan dan pengentasan kemiskinan. Sementara itu, program PTM yang akan dilaksanakan di desa Purwabakti belum dapat dikatakan relevan untuk tujuan SDGs berupa kecukupan pangan, kesetaraan gender, serta peningkatan peluang kerja dan diversifikasi usaha. Derajat potensi program PTM untuk pencapaian masing-masing indikator sebagai berikut:
 - a. Analisis potensi PTM terhadap tujuan SDGs (17) kemitraan dapat dideskripsikan melalui gambaran kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Pengintegrasian kelembagaan dalam program PTM di Desa Purwabakti dibuktikan melalui peran BPN dalam melaksanakan kolaborasi dengan

instansi pelaksana program pengembangan akses, pemerintah desa, BUM Desa, serta kelompok masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam mengikuti program dapat dikatakan baik sehingga mendukung jalannya program, utamanya dari tahapan pemetaan sosial.

- b. Analisis potensi PTM terhadap tujuan SDGs (1) tanpa kemiskinan digambarkan melalui prasyarat program untuk indikator berupa peningkatan pendapatan, kepemilikan aset sertipikat tanah, serta aksesibilitas dan layanan dasar. Rencana program pengembangan akses di Desa Purwabakti cukup prospektif dan memiliki potensi dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan melalui indikator peningkatan pendapatan dengan program pemberdayaan, bantuan kredit, penyuluhan, dan pendampingan terkait izin usaha. Sementara itu, program PTM dapat dikatakan kurang potensial dalam pencapaian SDGs (1) melalui kepemilikan aset sertipikat tanah dan perbaikan aksesibilitas serta peningkatan layanan dasar dikarenakan kurangnya program pemberdayaan yang berkelanjutan, kurangnya peningkatan aksesibilitas dan perbaikan akses kesehatan dan pendidikan, serta kurangnya modal dan alat produksi bagi pelaku usaha.
- c. Analisis potensi PTM terhadap tujuan SDGs (2) tanpa kelaparan dapat diketahui melalui prasyarat program yang meningkatkan ketahanan pangan serta mendukung praktik pertanian berkelanjutan. Model pemberdayaan di Desa Purwabakti yang akan dilaksanakan merupakan model yang memiliki fokus pada pengintegrasian sistem pertanian dengan sektor pertanian dan peternakan yang mendukung kecukupan pangan. Rencana pengembangan akses melalui model sistem pertanian terintegrasi dapat dikatakan cukup potensial dalam mendukung pencapaian tujuan SDGs (2) dengan adanya program penyuluhan dan edukasi pertanian serta pendampingan pembuatan auransi usaha tani dan izin edar usaha pertanian untuk POC.
- d. Analisis potensi PTM terhadap tujuan SDGs (5) kesetaraan gender dapat ditunjukkan melalui pengarusutamaan gender, yakni melalui identifikasi pengintegrasian gender pada setiap tahapan program PTM yang digambarkan melalui penyebutan gender dalam pemilihan kandidat tenaga

pendukung reforma agraria; pemenuhan perspektif kesetaraan gender dalam instrumen pemetaan sosial; serta melibatkan perempuan dalam pelaksanaan PTM melalui faktor partisipasi, akses, kontrol, dan manfaat.

- e. Analisis potensi PTM terhadap tujuan SDGs (8) pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi diidentifikasi menurut program yang dapat meningkatkan peluang kerja dan diversifikasi usaha. Program pengembangan akses yang akan dilaksanakan di Desa Purwabakti dapat dikatakan cukup potensial dalam pencapaian tujuan SDGs utamanya dalam mendukung diversifikasi usaha melalui pengembangan kegiatan pemberdayaan. Namun, terdapat kelemahan dikarenakan kurangnya pendampingan yang berkelanjutan, kurangnya modal dan alat produksi pelaku usaha, serta kurangnya perluasan kesempatan kerja akibat program PTM.

B. Saran

1. Perlu mengoptimalkan program pembentukan koperasi dan pemberian Asuransi Usaha Tani Padi sebagai program yang paling relevan dengan tujuan indikator SDGs dan memiliki potensi paling kuat karena sejalan dengan permasalahan yang dihadapi di desa.
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I perlu memperhatikan penyelenggaraan program pengembangan akses yang akan dilaksanakan oleh dinas dan instansi terkait supaya sesuai dengan tujuan berdasarkan model pemberdayaan yang dipakai. Kegiatan lanjutan penataan akses di Desa Purwabakti pada tahun kedua dan ketiga penting disesuaikan menurut petunjuk pelaksanaan teknis kegiatan penataan akses yang ada. Selain itu, perlu diperhatikan target penerima akses yang akan dituju, yaitu kepada 32 pemilik sertifikat dan responden pemetaan sosial sebagai subjek pemberdayaan.
3. Lembaga dan dinas terkait penyelenggaraan program pengembangan akses di Desa Purwabakti perlu dilaksanakan sesuai dengan arahan model yang berlaku serta subjek yang tepat sasaran. Kerja sama dan kolaborasi yang diberikan sangat berdampak pada tujuan kegiatan.

4. Masyarakat penerima akses serta subjek penataan akses di Desa Purwabakti perlu berpartisipasi dengan aktif untuk mendorong pencapaian tujuan pemberdayaan yang akan dilaksanakan. Pemahaman masyarakat penerima akses dan subjek penataan akses juga sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana, T. (2020) 'Pengaruh Tingkat Kesehatan, Tingkat pendidikan, dan Produktifitas terhadap Kemiskinan di Kalimantan', *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*, 8(2), pp. 1689–1699.
- Afriliyeni, Sihaholo, M. and Sita, R. (2021) 'Hubungan Reforma Agraria Dengan Peningkatan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani', *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 5(3), pp. 433–449. Available at: <https://doi.org/10.29244/jskpm.v5i3.834>.
- Afrizal (2017) 'Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu.'
- Ahbar, F. (2021) *Akses Reform sebagai Pemberdayaan Masyarakat*. Universitas Hassanuddin. Available at: [http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/6280/2/B022172031_tesis 1-2.pdf](http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/6280/2/B022172031_tesis%201-2.pdf).
- Alvian, F. and Mujiburohman, D.A. (2022) 'Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo', *Tunas Agraria*, 5(2), pp. 111–126. Available at: <https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.176>.
- ALWI, M. *et al.* (2022) 'Sarana Pendidikan, Kesehatan Dan Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Tanjung Sebagai Pusat Pertumbuhan Kabupaten Lombok Utara, Paska Gempa 2018 Dan Masa Pandemi Covid-19', *Ganec Swara*, 16(2), p. 1616. Available at: <https://doi.org/10.35327/gara.v16i2.327>.
- Amulya Jeevanasai, S. *et al.* (2023) 'Shades & shines of gender equality with respect to sustainable development goals (SDGs): The environmental performance perspectives', *Total Environment Research Themes*, 8(August), p. 100082. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.totert.2023.100082>.
- Andrianus, F. and Alfatih, K. (2023) 'Pengaruh Infrastruktur terhadap Kemiskinan: Analisis Data Panel 34 Provinsi di Indonesia', *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5, pp. 54–60. Available at: <https://doi.org/10.37034/infeb.v5i1.206>.
- Anida, A., Daryanto, A. and Hendrawan, D.S. (2018) 'Strategi Penyediaan Access Reform pada Program Reforma Agraria di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor', *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen*, 4(2), pp. 159–170. Available at: <https://doi.org/10.17358/jabm.4.2.159>.
- Ansori, Dzaki (2018) 'Sustainable Development Goals (SDGs) Dan Faktor – Faktor Kemiskinan Di Indonesia', *Acceleratig the World'S Research*, pp. 1–9.
- Ansori, D. (2018) 'Sustainable Development Goals (SDGs) Dan Faktor – Faktor Kemiskinan Di Indonesia', *Acceleratig the World'S Research*, pp. 1–9.
- Arisaputra, M.I. (2016) 'Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial', *Perspektif*, 21(2), p. 83. Available at: <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i2.188>.
- Augustina, P.H., Pujiriyani, D.W. and Farid, A.H. (2024) 'Perubahan Profil Kemiskinan Masyarakat Pasca Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Pendekatan Aset Penghidupan', 4(1), pp. 1–15.
- Azizah, S.N. (2022) *Kewirausahaan Perempuan di Indonesia*. Penerbit NEM. Available at:

- https://books.google.co.id/books?id=2EWEEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.
- Azriani, Z., Refdinal and Paloma, C. (2018) 'Pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan di Kota Padang', *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Pertanian UNS*, 2(1), p. E.36-43. Available at: <https://jurnal.fp.uns.ac.id/index.php/semnas/article/view/1133>.
- Bappeda (2016) *Sustainable Development Goals Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan, Jogja Dataku*. Available at: <https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/sdgs/detail/17-kemitraan-untuk-mencapai-tujuan> (Accessed: 28 December 2023).
- Bappenas (2017) *SDGs Knowledge Hub, Bappenas*. Available at: <https://sdgs.bappenas.go.id/> (Accessed: 15 November 2023).
- Le Blanc, D. (2015) 'Towards integration at last? The sustainable development goals as a network of targets', *Sustainable Development*, 23(3), pp. 176–187.
- Boberg-Fazlić, N. *et al.* (2022) 'Winners and losers from agrarian reform: Evidence from Danish land inequality 1682–1895', *Journal of Development Economics*, 155(April 2020), p. 102813. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2021.102813>.
- BPN (2023) *Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria*. Jakarta.
- Brundtland, G.H. (1987) *What is sustainable development. Our common future*.
- Chambers, R. (1996) *Rural Development: Putting the Last First*. London (GB): Longman Group Limited London Reprinted.
- Chavunduka, C., Dipura, R. and Vudzijena, V. (2021) 'Land, investment and production in agrarian transformation in Zimbabwe'.
- Christine, R. V. and Prasetyo, P. K., Sudibyanung, S. (2019) 'Relevance Of Agrarian Reform In Industry 4.0: Land Distribution Vs Land Bank', in *International Seminar Integrated Agrarian Land and Spatial Planning Policies for Sustainable Development*.
- Cook, S. and Macaulay, S. (1997) 'Practical steps to empowered complaint management', *Managing Service Quality: An International Journal*, 7(1), pp. 39–42. Available at: <https://doi.org/10.1108/09604529710158292>.
- Creswell, J. (2008) *Educational Research. Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research*. Edited by Pearson. Prentice Hall.
- Demartoto, A. (2007) *Menyibak sensitivitas gender dalam keluarga difabel*. Surakarta: LPP UNS dan UNS Press.
- Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN (2021) *Laporan Kinerja Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah*. Jakarta. Available at: [https://ditjenpptr.atrbpn.go.id/pengendalian/dokumentasi/dokumen_buku/LKJ Dit. Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah 2021.pdf](https://ditjenpptr.atrbpn.go.id/pengendalian/dokumentasi/dokumen_buku/LKJ%20Dit.%20Penertiban%20Penguasaan,%20Pemilikan%20dan%20Penggunaan%20Tanah%202021.pdf).
- Doly, D. (2017) 'Kewenangan Negara Dalam Penguasaan Tanah: Redistribusi Tanah Untuk Rakyat (the Authority of the State in Land Tenure: Redistribution of Land To the People)', *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 8(2), pp. 195–214. Available at:

<https://doi.org/10.22212/jnh.v8i2.1053>.

- Efendi, E. (2016) 'Implementasi Sistem Pertanian Berkelanjutan dalam Mendukung Produksi Pertanian', *Jurnal Warta*, 47, pp. 1689–1699.
- Elliyana, E., Ambo Paerah and Musdayanti (2020) 'Kredit Usaha Rakyat Bank Rakyat Indonesia Dan Peningkatan Pendapatan UMKM', *Jurnal Administrasi Kantor*, 8(2), pp. 153–162.
- Fakih, M. (1999) *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- FAO (1996) 'Food Security Assessment'. Rome.
- Fauzi, N. (2002) *Land reform: agenda pembaruan struktur agraria dalam dinamika panggung politik. menuju keadilan agraria: 70 tahun gunawan wiradi*. Bandung: Yayasan Akatiga.
- Feri, M. (2013) 'PENGARUH PENGETAHUAN PELUANG KERJA TERHADAP KEPUTUSAN MEMILIH JURUSAN SISWA SMK LKIA PONTIANAK', *Slideshare.Net*, 2(1), pp. 545–555. Available at: <https://www.slideshare.net/ALBICEE/lembar-observasi-siswa-50178674>.
- Fibrianto, A.S. (2018) 'Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Organisasi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2016', *Jurnal Analisa Sosiologi*, 5(1). Available at: <https://doi.org/10.20961/jas.v5i1.18422>.
- Frufonga *et al.* (2016) 'The impact of comprehensive agrarian reform program on farmer beneficiaries in the 3rd Congressional District of Iloilo, Philippines', *Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research*, 4(1), pp. 81–90.
- Galiani, S. and Schargrotsky, E. (2010) 'Property rights for the poor: Effects of land titling', *Journal of Public Economics*, 94(9–10), pp. 700–729. Available at: <https://doi.org/https://translate.google.com/website?sl=en&tl=id&hl=id&client=srp&u=https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.06.002>.
- Gunawan, W. (2000) *Reforma agraria perjalanan yang belum berakhir*. Yogyakarta: Insist Press KPA & Pustaka Pelajar.
- Gunawan, W. (2009) *Seluk beluk masalah agraria: reforma agraria dan penelitian agraria*. SAINS Press.
- Hadi, S.P. (2007) *Pembangunan Berkelanjutan*. Bandung: UMM Press.
- Handoyo, R., Sofie, S. and Wardhani, N. (2023) 'Implementasi Sustainable Development Goals (Sdgs), Goal 8 Pada Pelaku Usaha Mikro Di Desa Padas, Kecamatan Karangnom Dan Desa Bonyokan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten', *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 10(1), pp. 107–116. Available at: <https://doi.org/10.25105/jat.v10i1.16234>.
- Haryadi, B. (2008) *Pengaruh Faktor Psikologi, Sosial, Fisik dan Finansial terhadap Kepuasan Kerja Beauty Advisor di PT. Sinar Makro peson Sejahtera (Martha Tilaar Group) Cabang Surabaya*.
- Hasan, L. and Perkasa, R.D. (2023) 'Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Ksp Surya Abadi Mandiri, Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang', *GENTA MULIA: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, pp. 319–327.
- Hastuti, A.T. (2016) 'Analisis Kemiskinan dan Ketersediaan Infrastruktur di Pedesaan Kawasan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur', *Jurnal Universitas*

Brawijaya [Preprint].

- Hasyim, A.I. (2016) *Ekonomi Makro*. Jakarta: Prenada Media.
- Hellen, H., Mintarti, S. and Fitriadi, F. (2018) 'Pengaruh investasi dan tenaga kerja serta pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesempatan kerja', *Inovasi*, 13(1), p. 28. Available at: <https://doi.org/10.29264/jinv.v13i1.2490>.
- Herlinah, H. (2022) 'Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Industri Kreatif Di Kota Cirebon', *Jurnal Dinamika Pembangunan*, 2(1).
- Hermawati, I. et al. (2015) *Pengkajian konsep dan indikator kemiskinan*. Yogyakarta.
- Indriantoro, N. and Supomo, B. (2013) *Metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi & manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Irawadi, A., Juanda, B. and Munibah, K. (2020) 'Analisis Kemiskinan Spasial dan Kaitannya dengan Sertifikasi dan Penggunaan Lahan Pertanian di Kabupaten Mamuju', *Tataloka*, 22(1), pp. 70–82. Available at: <https://doi.org/10.14710/tataloka.22.1.70-82>.
- Iriani, L.Y. (2008) 'Peran Kemitraan dalam Penataan Ruang Terhadap Pengendalian Permukiman', *Jurnal Permukiman*, 3(3), p. 156. Available at: <https://doi.org/10.31815/jp.2008.3.156-164>.
- Irwan, I. and Agustang, A. (2021) 'Strategi Keberdayaan Masyarakat Menuju Desa Wisata Berbasis Masyarakat Yang Berkelanjutan', *Seminar Nasional LP2M UNM*, pp. 316–325. Available at: <https://ojs.unm.ac.id/semnaslemlit/article/view/25254%0Ahttps://ojs.unm.ac.id/semnaslemlit/article/viewFile/25254/12634>.
- Jackson, W. (1980) 'New Root for Agriculture, Friends of the Earth'. Sanfransisco, California.
- Jayanti, D.R. and Artiningsih, A. (2020) 'Aliran Inovasi Kerajinan Rambut Palsu Dalam Pengembangan Industri Kreatif Di Purbalingga', *Jurnal Pengembangan Kota*, 8(1), pp. 23–32. Available at: <https://doi.org/10.14710/jpk.8.1.23-32>.
- Kaul, I. et al. (2015) 'Policy Debate| Financing the SDGs: Global vs Local Public Goods', *International Development Polic' Revue internationale de politique de développement*. [Preprint].
- Kementerian ATR/BPN (2023) *Pemberdayaan Masyarakat di Desa Purwabakti Bogor*. Bogor. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=N81KF1Q7yDU&t=2s&ab_channel=KementerianATRBPBPN.
- Komariah, A. and Djam'an, S. (2011) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. Available at: <http://kin.perpusnas.go.id/DisplayData.aspx?pId=42664&pRegionCode=JI UNMAL&pClientId=111>.
- Kurniawan, A.F., Suharto, E. and Andari, D.W.T. (2023) 'Prospek dan Keterbatasan Acces Reform Berbasis Potensi Wilayah Desa di Kalurahan Sumberarum Prospects and Limitations of Access to Reform Based on Village Area Potential in Sumberarum District Andhika Fajar Kurniawan , Eko Suharto , Dwi Wulan Titik Andari', *Tunas Agraria*, 6(September), pp.

204–219.

- Kurniawan, R.H. (2004) *Analisis Garis Kemiskinan Dan Distribusi Pendapatan Di Kabupaten Sidoarjo*. Universitas Airlangga.
- Lakitan, B. (2014) 'Identifikasi Teknologi yang Relevan untuk Mendukung Diversifikasi Usaha Pe(tani) dan Diversifikasi Konsumsi Pangan di Indonesia', *Teknovasi Indonesia*, III(1), pp. 1–25.
- Latifah, H., Wibowo, A. and Widiyanto (2022) 'Dampak Implementasi Program Sustainable Development Goals(Sdgs) Desa Di Desa Johunut, Kecamatan Paranggupito, Kabupaten Wonogiri', *Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2022 LP2M UST Yogyakarta*, pp. 1–9.
- Leibo, J. and Nasikun, J. (1995) *Sosiologi pedesaan*. Andi Offset.
- Lingarwati, T. *et al.* (2021) 'IMPLEMENTASI SDGs DI DESA PANDAK, KECAMATAN BATURRADEN, KABUPATEN BANYUMAS', *Prosiding Seminar Nasional dan Callfor Papers*, pp. 361–368. Available at: <https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/3415/mendes-pdtt-jadikan-sdgs-des-a-sebagai-langkah->.
- Lumbanraja, P. and Malau, S. (2002) 'Pertanian Berkelanjutan', (April), pp. 1–10.
- Made Wiasti, N. (2017) 'Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG)', *Journal Of Anthropology*, 1(1), p. 29.
- Mangantar, M. *et al.* (2016) 'Analisis Kinerja Keuangan Berbasis Diversifikasi Usaha Di Di Bursa Efek Indonesia', *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4), pp. 3–4.
- Maxwell, S. and Frankenberger, T. (1992) *Household food security: Concepts, indicators, measurements*.
- Mubyarto (1997) *No Program IDT dan Perekonomian Rakyat Gugus Nusa Tenggara*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Muhamad, A.N. (2021) 'Migrasi Total Masuk Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun 2015: Tren Dan Determinan', *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(1), pp. 35–48. Available at: <https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i1.1560>.
- Mulyani, A., Ritung, S. and Las, I. (2011) 'Potensi dan ketersediaan sumber daya lahan untuk mendukung ketahanan pangan', *Jurnal Litbang Pertanian*, 30(12), pp. 73–80.
- Murniningtyas, A. and Endah, S.A. (2018) 'Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia', III.
- Nasution (2003) *Metode penelitian naturalistik kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Ndraha, T. (1990) *Pembangunan Masyarakat; Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Noor, M. (2010) 'Analisis Kelembagaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan untuk Penanggulangan Kemiskinan', *Jurnal Ilmiah Untag*, pp. 113–124.
- Noor, M. (2011) 'Pemberdayaan Masyarakat', *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1(2), p. 88. Available at: <https://doi.org/10.2307/257670>.Poerwanto.
- Nurhaeni, I.D.A. *et al.* (2022) *Analisis Gender Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. 1st edn. Jakarta: Direktorat Jenderal

- Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- O'Connell, P. (1990) 'Policy Development for the Low-input Sustainable Agriculture'. Prograq, SCS, Ankeny, Iowa, USA.
- Osborn, D., Cutter, A. and Ullah, F. (2015) *Universal Sustainable Development Goals*. Available at: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1684SF_-_SDG_Universality_Report_-_May_2015.pdf.
- Pandamdari, E. (2019) 'Harapan Sejahtera dan Adil melalui Peraturan Presiden Nomor 86', 1(Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum).
- Panuluh, S. and Fitri, M.R. (2016) 'Perkembangan pelaksanaan sustainable development goals (SDGs) di Indonesia', *Biefing Paper*, 2, pp. 1–25.
- Parhusip, A. (2022) 'Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Untuk Menciptakan Lapangan Pekerjaan. (Studi Kasus Balai Besar Pelatihan Vokasi & Produktivitas Kota Medan)', *Jurnal Ilmiah Kohesi*, 6(3), pp. 5–10.
- Pasrizal, H. (2019) 'Pengaruh Peran Teknologi, Orientasi Pasar, Pelatihan, Dan Infrastruktur Terhadap Keunggulan Bersaing Bank Syariah', *Imara: JURNAL RISET EKONOMI ISLAM*, 3(2), p. 151. Available at: <https://doi.org/10.31958/imara.v3i2.1671>.
- Pfeffer and Salancik (1996) 'No Title'. Yogyakarta: Pustaka.
- Pradhan, B.K. *et al.* (2023) 'Achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) in the Indian State of Odisha: Challenges and Opportunities', *World Development Sustainability*, 3(August 2022), p. 100078. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.wds.2023.100078>.
- Prayitno, G., Maulida RF, B. and Nugraha, A.T. (2019) 'Modal Sosial, Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan Desa Ngadireso, Indonesia', *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 14(2), p. 229. Available at: <https://doi.org/10.20961/region.v14i2.30018>.
- Presiden Republik Indonesia (2018) *Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria*. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/94721/perpres-no-86-tahun-2018>.
- Puji Sopyan, A.A. and Sidipurwanti, E. (2024) 'Mengurai Kompleksitas Pemberdayaan Tanah Masyarakat : Pelajaran dari Gugus Tugas Reforma Agraria di Bangka Tengah', *Tunas Agraria*, 7(May), pp. 201–220. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.296>
- Mengurai.
- Purwaningsih, Y. (2008) 'Ketahanan pangan: situasi, permasalahan, kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat', *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(1).
- Puspahadi, D. and Radyati, M.R.N. (2022) 'Analisa Dampak Dan Keberlanjutan Program Pemberdayaan Masyarakat "Desa Mitra" Pt Indofood Sukses Makmur Tbk', *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 1(4), pp. 473–481.
- Puspitawati, H. (2013) 'Konsep , teori dan analisis gender', *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(1), pp. 1–13. Available at: <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/52842671/gender-libre.pdf?1493266306=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DGender.pdf&Expires=1674777345&>

- Signature=Y6fry5iwllmBch2OV3WbcEefGwiVO0~oi-
pJx07y9zVw5D0e1Ph05VF-pGbqCF8-n7CnSGhj-8bjAua2XEQt4p-2.
- Putra, I.K.A.A. and Arka, S. (2016) 'Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Kesempatan Kerja, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Pada Kabupaten / Kota Di Provinsi Bali', *EP Unud*, 7(3), pp. 416–444.
- Raco, J.R. (2010) *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by A. L. Jakarta: PT Grasindo.
- Rahayu, O.D. (2023) *Pengarusutamaan Gender Dalam Pelaksanaan Akses Reforma Agraria Di Kalurahan Selopamioro Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Rahayu, W.K. (2017) 'Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (studi kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah)', (*Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik*), 2(1), pp. 93–108. Available at: file:///C:/Users/Acer/Downloads/502-972-1-SM.pdf.
- Ramadhani, R.W. and Prihantoro, E.- (2020) 'Strategi Komunikasi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam Menerapkan Nawacita dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan', *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 18(02), pp. 117–129. Available at: <https://doi.org/10.46937/18202028913>.
- Reganold, J.P. *et al.* (1990) 'Sustainable Agriculture', *Scientific American, a division of Nature America, Inc.*, 262(6), pp. 112–121.
- Riawan, R. and Kusnawan, W. (2018) 'Pengaruh Modal Sendiri dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan Usaha (Studi Pada UMKM di Desa Platihan Kidul Kec. Siman)', *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 19(1), p. 31. Available at: <https://doi.org/10.29040/jap.v19i1.158>.
- Rino, R.Y., Dekrita, Y.A. and Da Silva, Y. (2024) 'Improving planning capacity at the planning and research and development agency (bapelitbang) in an effort to reduce extreme poverty in sikka district', 7, pp. 5637–5652.
- Riyanto, S., Azis, M.N.L. and Putera, A.R. (2021) *Analisis SWOT sebagai Penyusunan Strategi Organisasi*. Edisi I. Sleman: Bintang Pustaka Madani.
- Rohman, M.L. and Astuti, P. (2019) 'Access Reform Dalam Program Reforma Agraria: Studi Kasus Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara', *Journal of Politic and Government Studies*, 8(4), pp. 381–390. Available at: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/25067>.
- Saheriyanto, S. and Suhaimi, A. (2021) 'Pendampingan dan Akses Modal sebagai Strategi Access Reform dari Tanah Pelepasan Kawasan Hutan di Kabupaten Barito Kuala', *Jurnal Pertanahan*, 11(1), pp. 76–88. Available at: <https://doi.org/10.53686/jp.v11i1.47>.
- Santosa, S., Wicaksono, A. and Nugroho, R. (2019) 'Multi-Role Collaboration Of Ministries And Institutions In The National Land Agency Regional Office of West Kalimantan', *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 5(3), pp. 9–18. Available at: <https://doi.org/10.31292/jb.v5i3.384>.
- Sari, M., Syechalad, M.N. and Majid, S.A. (2016) 'Pengaruh investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia', *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 3(November), pp. 109–115.

- Sebestyén, V. *et al.* (2019) 'Network model-based analysis of the goals, targets and indicators of sustainable development for strategic environmental assessment', *Journal of environmental management*, 238, pp. 126–135.
- Setiyawan, A. (2014) 'Mudzakkar dan Muannats: Sumber Pendidikan Islam Bias Gender', *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), p. 245. Available at: <https://doi.org/10.14421/jpi.2014.32.245-266>.
- Shanto (2016) *Pekerjaan Layak atau Decent Work*, *SPNews*. Available at: <https://spn.or.id/pekerjaan-layak-atau-decent-work/> (Accessed: 23 November 2023).
- Sihombing, B. and Lisdiyono, E. (2017) 'International journal of civil engineering and technology (IJCIET)', 8(11), pp. 248–356.
- Siregar, F.A. (2023) 'Pengembangan Usaha Agroturisme Untuk Diversifikasi Pendapatan Petani Di Daerah Pedesaan', *Universitas Medan*, pp. 1–11.
- Stockholm Declaration on the Human Environment (1972) *United Nations Conference on the Human Environment*.
- Subarsono, A. (2011) *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudibyanung, S., Prasetyo, P.K. and Rahmadi, A. (2023) 'Peluang Penataan Akses Berdasarkan Potensi Wilayah:(Studi Kasus Di Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulo Progo)', *Jurnal Pertanahan*, 13(2), pp. 85–100.
- Sugiyono (2005) *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2015) *Metode penelitian kombinasi (mix methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2019) *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2002) *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta: P.T.Rajawali Grafindo Persada.
- Sulistiono and Mashadi (2018) 'Diversifikasi perkebunan kopi sebagai tempat wisata di Pangalengan Kabupaten Bandung', *Jurnal Abdimas Pengabdian di Lapangan*, 2(1), pp. 38–43. Available at: <https://jurnal.stiekesatuan.ac.id/index.php/abdimas/article/view/165>.
- Supriyadi (1997) *Pola Kemitraan Usaha Kecil, Menengah, dan Besar di Masa yang Akan Datang*. Jakarta.
- Surmayadi, N. (2005) *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama Pertama.
- Suroto (2000) *Strategi pembangunan dan Perencanaan Perencanaan Kesempatan Kerja*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Sutaryono (2023) *Penguatan Integrasi Agraria Pertanahan & Tata Ruang Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*.
- Sutedi, A. (2009) *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Taufik, M.N.B. (2022) 'Strategi Komunikasi Pemberdayaan Desa Wisata Kemiren dalam Upaya Mendukung Sustainable Development Goals', *Commercium*, 6(1), pp. 21–33. Available at: <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/Commercium/article/view/49269/40974>.
- Theresia, A. (2014) *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.

- Trinanda Putra, Z., Nugroho, A. and Nashih Luthfi, A. (2021) 'Peran GTRA dalam Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Lampung Tengah', *Widya Bhumi*, 1(1), pp. 65–85. Available at: <https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.10>.
- Umar, H. (2013) *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis*. Jakarta: Rajawali.
- Umar, N. (1999) *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif alQur'an*. Jakarta: Paramadina.
- United Nation (2013) *Sustainable Development Goals, United Nation*. Available at: <https://sdgs.un.org/goals>.
- Usman, S. (2004) *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Utomo, S. (2021) 'Perjalanan Reforma Agraria Bagian Dari Amanah Konstitusi Negara', *Veritas et Justitia*, 7(1), pp. 115–138. Available at: <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3935>.
- Vranciska, E. (2023) 'Prosiding: Ekonomi dan Bisnis Mahasiswa dalam Memilih Program Studi Akuntansi (Studi Kasus Universitas Buddhi Dharma', *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis*, 3(1).
- Wahab, S.A. (2004) *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Waldo, D. (1996) *Pengantar Studi Public Administration*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Weingartner, L. (2004) 'The Conct of Food and Nutrition Security in Klaus Klennert (ed).' Bonn, Germany.
- Widodo, S. (2017) 'A critical review of indonesia's agrarian reform policy', *Journal of Regional and City Planning*, 28(3), pp. 204–218. Available at: <https://doi.org/10.5614/jrcp.2017.28.3.4>.
- Widoyoko, E.P. (2014) *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widyanti, Wenefrida and Perwira, D. (no date) *Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (BKPK), Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (BKPK)*. Available at: <http://www.smeru.or.id/newslet/2001/ed03/200103brief.htm>. (Accessed: 23 November 2023).
- Winarno, B. (2008) *Kebijakan Publik (teori dan proses)*. Jakarta: Media Pressindo.
- World Bank (2004) *Kemiskinan, World Bank*. Available at: <http://www.worldbank.org/>.
- Yekti, G.I.A. (2016) 'Koperasi, Solusi Pengentasan Kemiskinan', *Jurnal Ilmiah Agribios*, 1(1), pp. 1–9. Available at: <https://media.neliti.com/media/publications/338147-koperasi-solusi-pengentasan-kemiskinan-e2173f72.pdf>.
- Yudha Prakarsa, D., Suryo Bintoro, N. and Pengaruh Inklusi Keuangan, A. (2023) 'Contemporary Studies in Economic, Finance and Banking', 2(1), pp. 26–38. Available at: <http://dx.doi.org/10.21776/csefb.2023.02.1.03>.
- Zarkasyi, H.F. (2012) 'Liberalism, Liberalization and Their Impacts of Muslim Education', *Jurnal TSAQAFAH*, 8(1), pp. 183–210.
- Zein, S. (2014) 'Reformasi Agraria Dari Dulu Hingga Sekarang Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(2), pp. 121–135. Available at: <https://doi.org/10.35968/jh.v9i2.357>.